

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

EDISI
AGUSTUS
2019

<https://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

EDISI
AGUSTUS
2019



©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA EDISI
AGUSTUS 2019

ISSN :2477-4472
Katalog BPS :1103002.94
No. Publikasi :94550.1917

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Tata Letak : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi
Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kover : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi
Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2019
viii + 54 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

HEADLINE



EKSPOR IMPOR (Juta US\$)

Juli 2019

Ekspor	13,19
Impor	25,27
Neraca Perdagangan	-12,08



NILAI TUKAR PETANI

Juli 2019

NTP	93,14
Inflasi Pedesaan	-0,3 %



PERTUMBUHAN EKONOMI

Triwulan II-2019

-23,98 %

01

INFLASI

Juli 2019



Kota Jayapura	Merauke
-0,41 %	- 0,49 %
IHK 141,78	IHK 139,05

02

03

ANGKUTAN LAUT

Juni 2019



Penumpang(org)	Barang(ton)
Berangkat 13.652	Muat 7.404
Datang 20.057	Bongkar 87.350

04

05

INDUSTRI

Triwulan II-2019



IBS	IMK
-1,74 %	8,40 %

06

07

INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Triwulan II-2019



118,68

IDI
2018

62,20

08

PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Import, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan. Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Agustus 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,

Drs. SIMON SAPARY, M.Sc

DAFTAR ISI

- iv _____ *Headline*
- vi _____ *Prakata*
- viii _____ *Daftar Isi*

Sosial dan Kependudukan

- 3 _____ *Penduduk*
- 6 _____ *Kemiskinan*
- 9 _____ *Ketenagakerjaan*
- 11 _____ *Indeks Pembangunan Manusia*
- 14 _____ *Indeks Kebahagiaan*
- 16 _____ *Potensi Desa (PODES)*

Ekonomi dan Perdagangan

- 20 _____ *Inflasi (update)*
- 22 _____ *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (update)*
- 25 _____ *Ekspor (update)*
- 27 _____ *Impor (update)*
- 29 _____ *Nilai Tukar Petani (NTP) (update)*
- 31 _____ *Angkutan Laut (update)*
- 33 _____ *Industri Manufaktur (update)*
- 35 _____ *Indeks Tendeksi Konsumen (ITK) (update)*

Pertanian

- 39 _____ *Pertanian*

Indikator Lainnya

- 41 _____ *Informasi Lainnya (update)*



**SOSIAL
DAN
KEPENDUDUKAN**

<https://papua.bps.go.id>

PENDUDUK



Tahukah anda??

“Jumlah penduduk Papua tahun 209 mencapai 3.379.302 jiwa”

Awalnya, penduduk dipandang hanya sebagai input atau alat dalam pembangunan, bukan sebagai sasaran pembangunan. Saat itu fokus pembangunan antara lain hanya pada modal, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

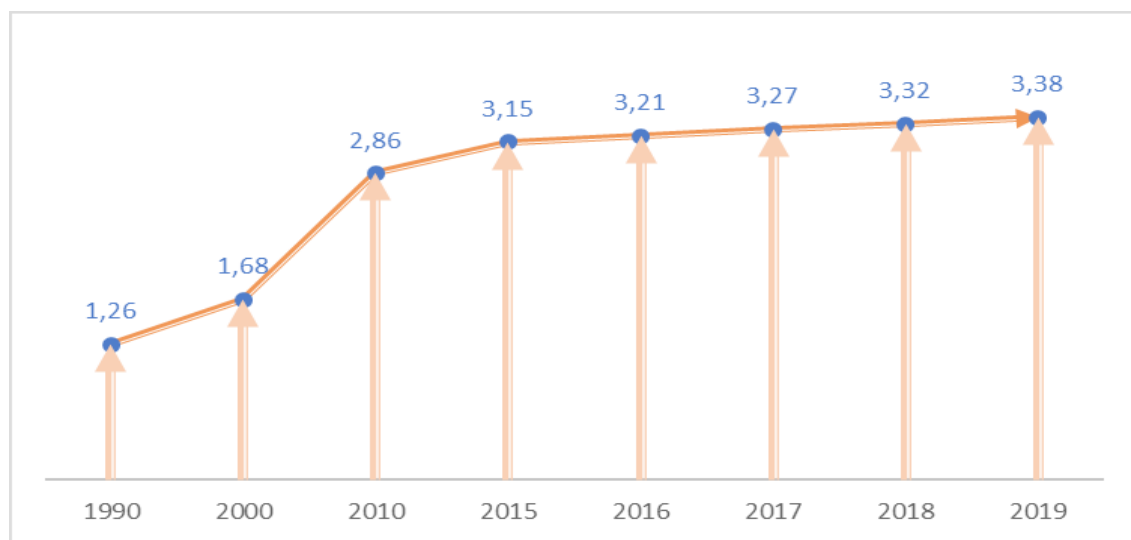
Di tahun 1990, setelah beberapa dekade pembangunan berlalu, ditemukan fakta bahwa kenaikan pendapatan nasional belum tentu dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa selain sebagai alat pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran pembangunan.

Oleh karena itulah fokus pembangunan berpindah dari kebijakan yang terfokus pada pendapatan nasional menjadi kebijakan yang terpusat pada pembangunan manusia (Harry Seldadyo, UNDP).

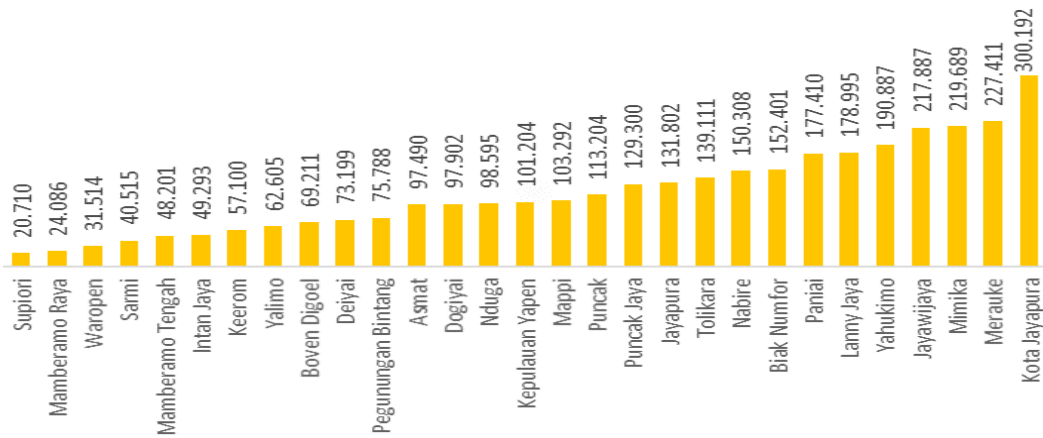
Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk Papua mencapai 3.379.302 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,76 persen dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2018.

Menurut penyebarannya, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 300.192 jiwa, sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 20.710 jiwa.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1990, 2000, 2010, 2015–2019 (juta orang)



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019 (orang)



Dengan luas wilayah mencapai 316.553,07 km², kepadatan penduduk di Provinsi Papua hanya 10 jiwa/km². Disparitas kepadatan penduduk antar kabupaten/kota sangat tinggi. Kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang mencapai 303-304 jiwa/km²; sedangkan yang terendah adalah di Mamberamo Raya yang hanya sekitar 8 jiwa per km².

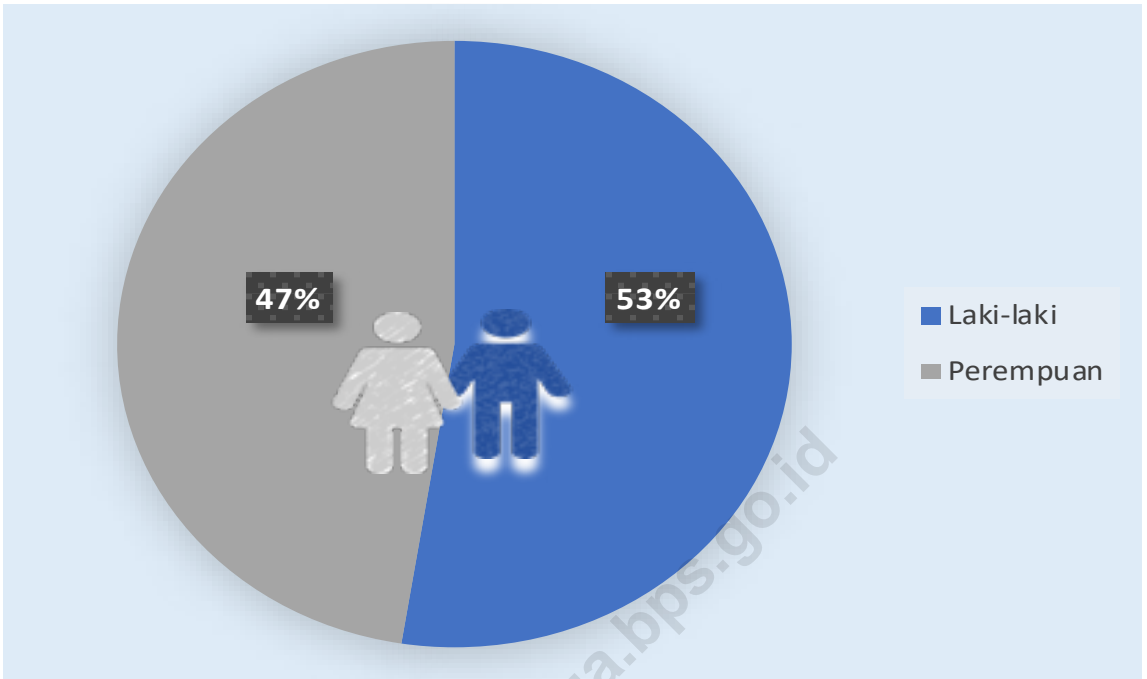
Untuk melihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah dapat digunakan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 110,60. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 110 hingga 111 penduduk laki-laki.

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Hal ini ditunjukkan dari bentuk piramida penduduk Papua yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda) yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Papua.

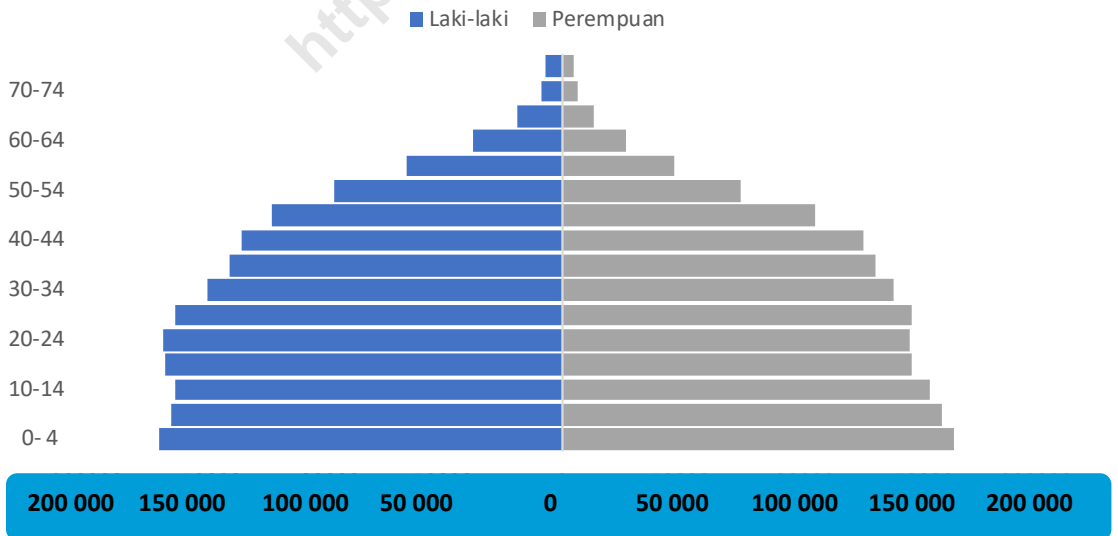
Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan menunjukkan beban atau banyaknya penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Secara umum, rasio ketergantungan di Papua tahun 2019 sebesar 44,32 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2019 (orang)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua, 2019 (orang)



KEMISKINAN



Tahukah anda??

“Persentase penduduk miskin Provinsi pada September 2018 turun menjadi 27,43 persen, terendah dalam kurun waktu dua dekade terakhir”

Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

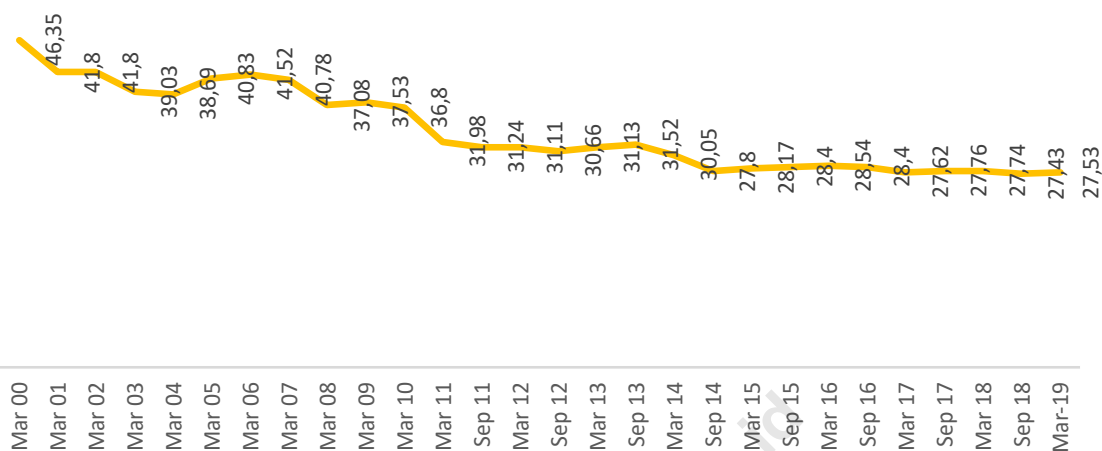
Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) menurun 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.

Selama enam bulan terakhir persentase penduduk miskin Papua mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin yaitu dari 27,43 persen pada September 2018 menjadi 27,53 persen pada Maret 2019. Berbeda lagi jika dibandingkan dengan Maret 2018, terjadi penurunan 0,21 poin persen.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2019 terdapat 885,35 ribu jiwa atau 36,84 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 41,01 ribu jiwa atau 4,26 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2018), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,25 persen. Untuk daerah perdesaan persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen.

Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, Maret 1999 – Maret 2019 (persen)



Data Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 3 (tiga) provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 27,53 persen, 22,17 persen dan 21,09 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,47 persen, diikuti oleh Provinsi Bali 3,79 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,55 persen.

Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2019 adalah Rp.540.099,-. Selama September 2018 - Maret 2019 terjadi kenaikan GK, yaitu mencapai Rp 21.288,- atau sebesar 4,10 persen.

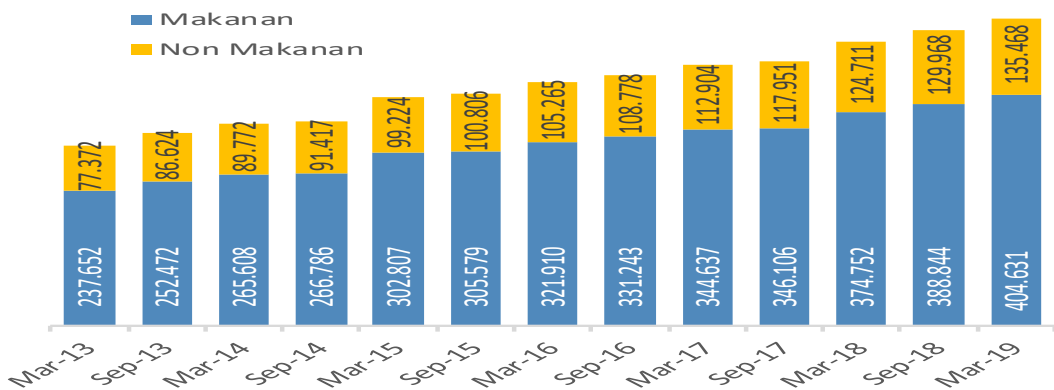
Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar Rp.588.744,-. Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp 520.117,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode Maret 2018-September 2018, indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 5,91 pada September 2018 menjadi 7,17 pada Maret 2019. Demikian pula dengan Indeks Keparahkan Kemiskinan naik dari 1,82 menjadi 2,60 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua, 2012-September 2018 (rupiah)

Tahun	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Sep-12	344 415	281 022	297 502
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811
Mar-19	588 744	520 117	540 099

Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua, Maret 2013-Maret 2019 (rupiah)



KETENAGAKERJAAN



Tahukah anda??

“Nilai TPAK dan TPT Papua pada Februari 2019 masing-masing sebesar 76,04 persen dan 3,42 persen”

Pada Februari 2019, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,81 juta orang atau berkurang 27,12 ribu orang dibandingkan Agustus 2018.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2019 menurun dibandingkan Februari 2018. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Februari 2019 mengalami penurunan sekitar 3,07 persen dibanding Agustus 2018.

Jumlah pengangguran di Papua pada Februari 2019 sebanyak 61.885 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2018. Jumlah pengangguran bertambah 8.067 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 2,91 persen pada Februari 2018 menjadi 3,42 persen pada Februari 2019.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Agustus 2016 –Februari 2019

Jenis Kegiatan Usaha	2016		2017		2018		2019	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Penduduk 15+	2 245 462	2 268 851	2 291 111	2.332.383	2.320.862	2.378.923		
Angkatan Kerja	1 722 162	1 753 858	1 762 841	1.851.486	1.835.963	1.808.848		
Bekerja	1 664 485	1 684 389	1 699 071	1.797.668	1.777.207	1.746.963		
Penganggur	57 677	69 469	63 770	53.818	58.756	61.885		
Bukan Angkatan Kerja	523 300	514 993	528 270	480.897	498.899	570.075		
Sekolah	195 635	188 297	181 879	193.332	176.043	220.158		
Mengurus RT	268 585	274 816	278 056	243.493	256.249	277.906		
Lainnya	59 080	51 880	68 335	44.072	52.607	72.011		
TPAK (%)	76,70	77,30	76,94	79,38	79,11	76,04		
TPT (%)	3,35	3,96	3,62	2,91	3,20	3,42		

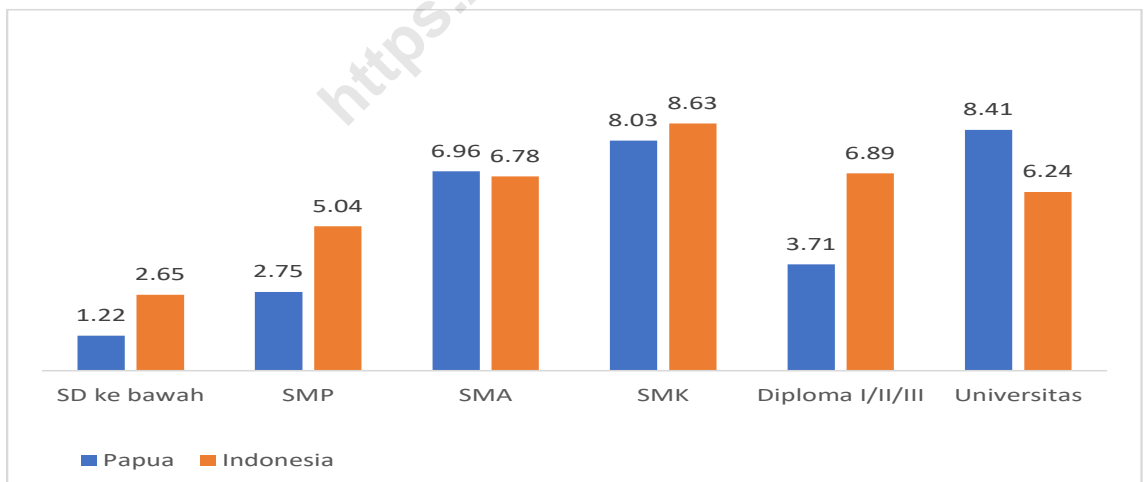
Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 5,01 persen. TPT tertinggi di Papua berada pada tingkat Pendidikan Universitas yang mencapai 8,41 persen. Penganggur dengan tingkat Pendidikan sekolah lainnya yang memiliki TPT diatas lima persen yakni penganggur dengan tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (8,03 persen) dan Sekolah Menengah Atas (6,96 persen).

Selain itu, tingkat pendidikan lainnya yang mempunyai TPT dibawah empat persen yaitu Pendidikan Diploma I/II/III (3,71 persen) dan Sekolah Menengah Pertama (2,75 persen).

Pada Februari 2019, TPT terkecil berada pada penganggur dengan tingkat pendidikan SD Ke bawah yaitu 1,22 persen.

Struktur lapangan pekerjaan di Papua pada Februari 2019 masih menunjukkan gambaran yang sama dengan periode sebelumnya. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Papua. Pada Februari 2019, jumlah pekerja pada kategori ini mencapai 67,51 persen dari total tenaga kerja atau mencapai 1.179.377 orang.

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, Februari 2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Tahukah anda??

“IPM Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 60,06 dan status pembangunan berubah dari kategori rendah menjadi sedang”



Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

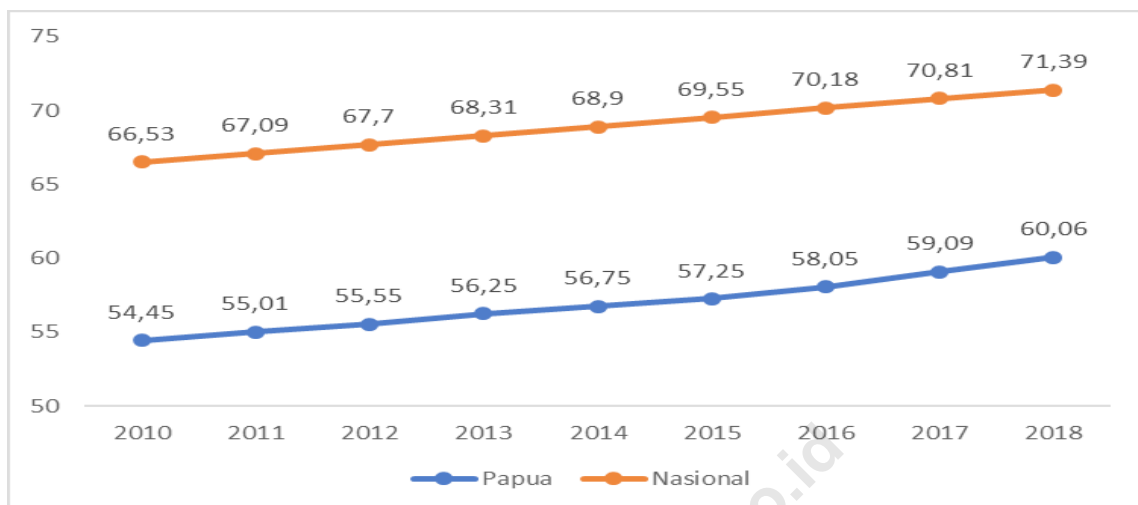
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup

dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi sebesar 60,06 di tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur Indonesia ini rata-rata tumbuh sebesar 1,64 persen.

Gambar 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2018



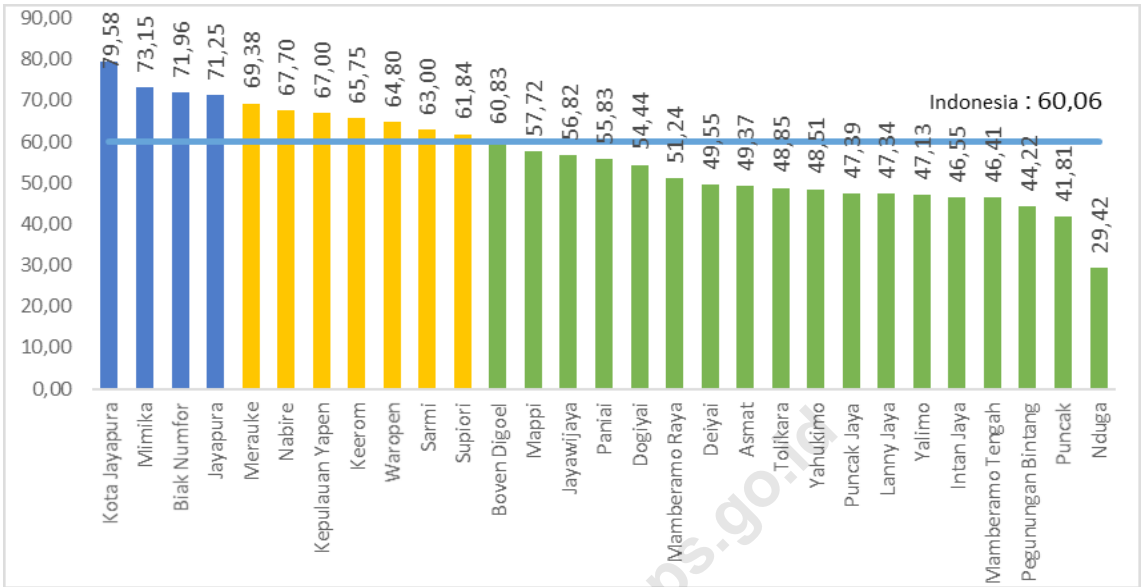
Dan selama tahun 2017-2018, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus “rendah” menjadi berstatus “sedang”.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2018 cukup bervariasi. Mayoritas kabupaten di Papua masih memiliki status “rendah”. Kabupaten dengan IPM berstatus “sedang” adalah Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, dan Supiori. Adapun kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” adalah Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua yaitu sebesar 29,42. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2018, IPM Kota Jayapura ini mencapai 79,61.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Top movers IPM di Papua (kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat), yaitu: Kabupaten Nduga (5,56 persen), Pegunungan Bintang (2,27 persen), dan Yalimo (2,04 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan.

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2018



INDEKS KEBAHAGIAAN



Tahukah anda??

“Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52.”

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial			
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98

POTENSI DESA (PODES)



Tahukah anda??

“Data PODES 2018 mencatat, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota”

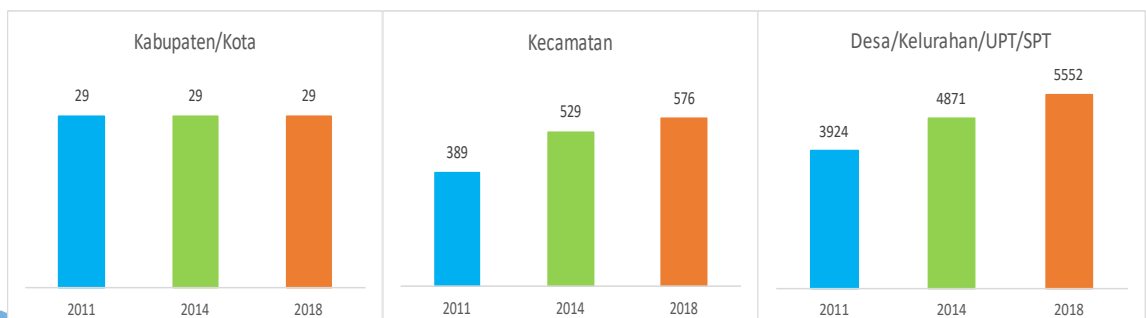
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/ Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri

dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Gambar 10. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018



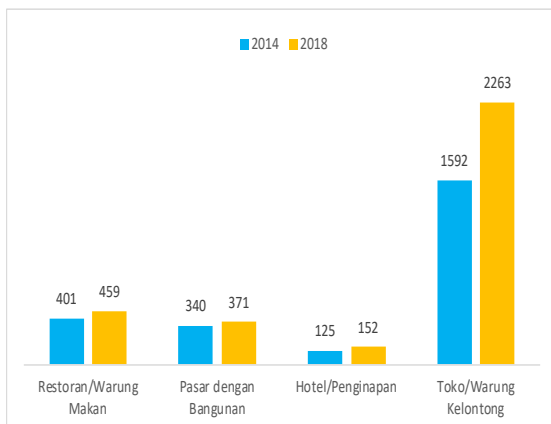
Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas

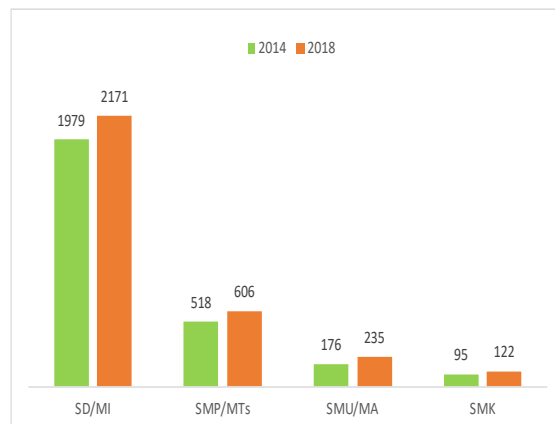
pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 11. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





**EKONOMI
DAN
PERDAGANGAN**

<https://papualps.go.id>

INFLASI



Tahukah anda??

“Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,41 persen dan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,49 persen pada Juli 2019.”

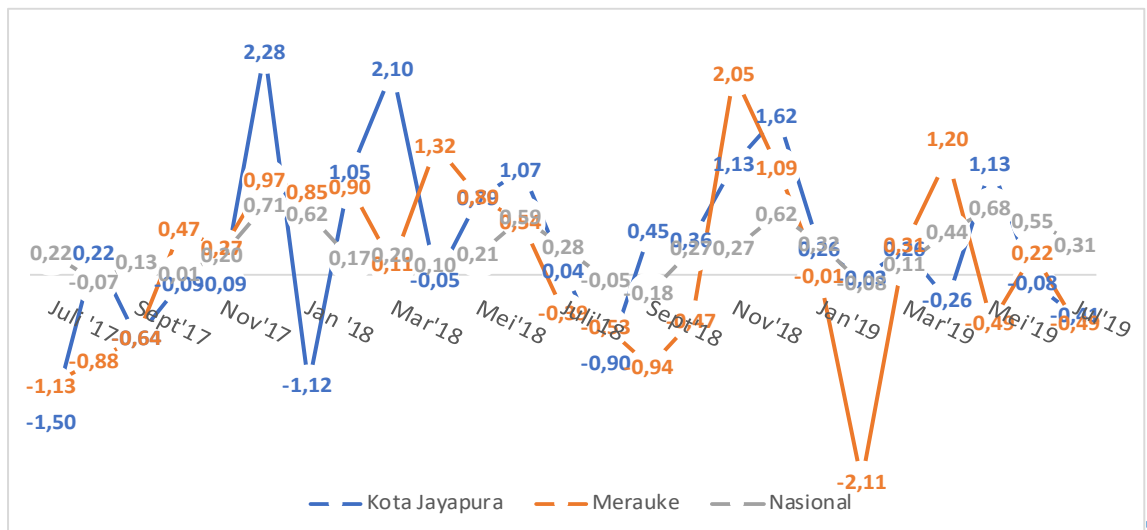
Pada Bulan Juli 2019 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks yang searah, dimana Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,41 persen dan Merauke mengalami deflasi 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing sebesar 141,78 dan 139,05.

Deflasi di Kota Jayapura terjadi akibat penurunan harga barang dan jasa pada kelompok bahan makanan sebesar -0,66 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar -0,07 persen; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,16 persen. Adapun kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar

0,02 persen; kelompok sandang sebesar 0,52 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,03 persen.

Faktor pendorong terjadinya deflasi di Kota Jayapura bulan Juli 2019 adalah penurunan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: tarif angkutan udara, ikan ekor kuning, bawang merah, cabai rawit, buah pinang, tomat sayur, kubis, cabai merah, bawang putih, tomat buah, dan lain-lain. Adapun komoditi yang mengalami kenaikan harga antara lain: seragam sekolah anak, daging sapi, gula pasir, ikan mujair, mobil, kangkung, kentang, talas/keladi, daging ayam kampung, ikan gabus, dan lain-lain.

Gambar 13. Perkembangan Inflasi Kota Jayapura, Merauke dan Nasional Juli 2018-Juli 2019



Sedangkan di Merauke penurunan harga barang dan jasa disebabkan oleh penurunan angka indeks pada kelompok bahan makanan sebesar -2,66 persen. Adapun kelompok yang mengalami inflasi yaitu pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,13 persen; kelompok sandang sebesar 0,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,03 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,73 persen.

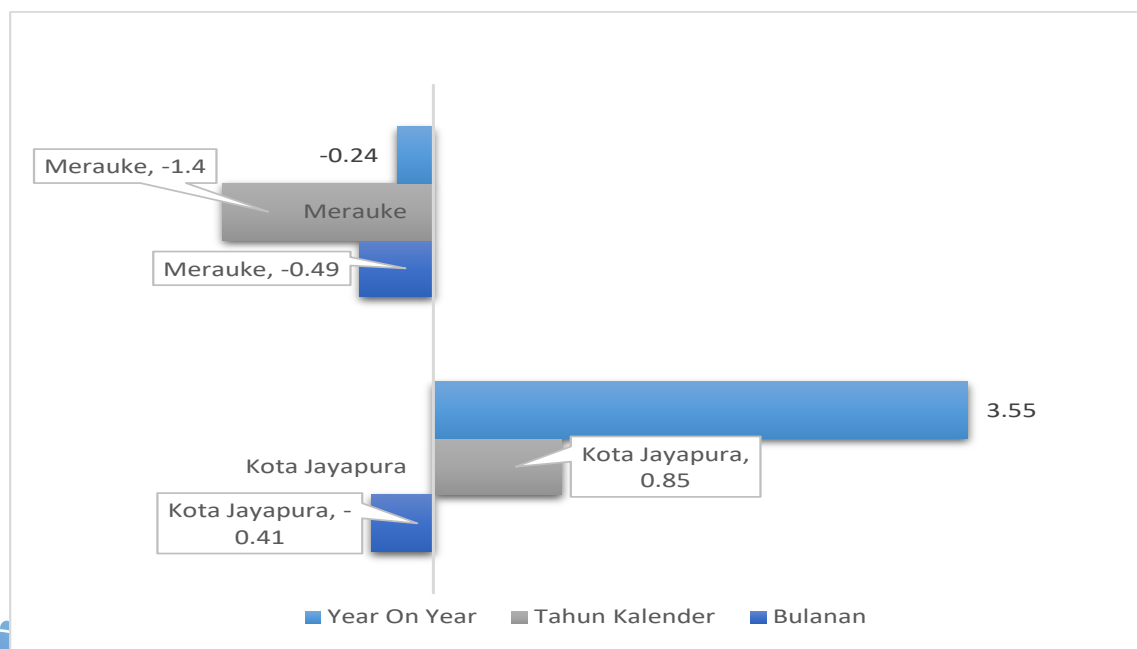
Sementara itu faktor pendorong terjadinya deflasi di Merauke bulan Juli 2019 adalah penurunan harga pada beberapa komoditas antara lain: bawang putih, ikan mujair, bayam, bawang merah, ikan kembung, kubis, tomat buah, daging ayam ras, cabai merah, kembang kol, dan lain-lain. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan yaitu pada komoditi: tarif

angkutan udara, kacang panjang, cabai rawit, obat dengan resep, ketimun, kangkung, daging ayam kampung, daun kemangi, emas perhiasan, daging sapi, dan lain-lain.

Dari 82 kota IHK tercatat 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota lainnya mengalami deflasi. Kota Jayapura menempati urutan ke-74 di tingkat nasional dan ke-12 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua), sedangkan Merauke menempati urutan ke-76 di tingkat nasional dan ke-14 di tingkat Sulampua.

Inflasi tahun kalender di Kota Jayapura pada bulan Juli sebesar 0,85 persen, dan laju inflasi year on year (Juli 2018 terhadap Juli 2019) sebesar 3,55 persen. Inflasi tahun kalender Merauke di bulan Juli 2019 sebesar -1,40 persen, dan laju inflasi year on year (Juli 2018 terhadap Juli 2019) sebesar -0,24 persen.

Gambar 14. Laju Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year On Year di Kota Jayapura dan Merauke, Juli 2019 (%)



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)



Tahukah anda??

“Ekonomi Papua triwulan II-2019 mengalami kontraksi 23,98 persen.”

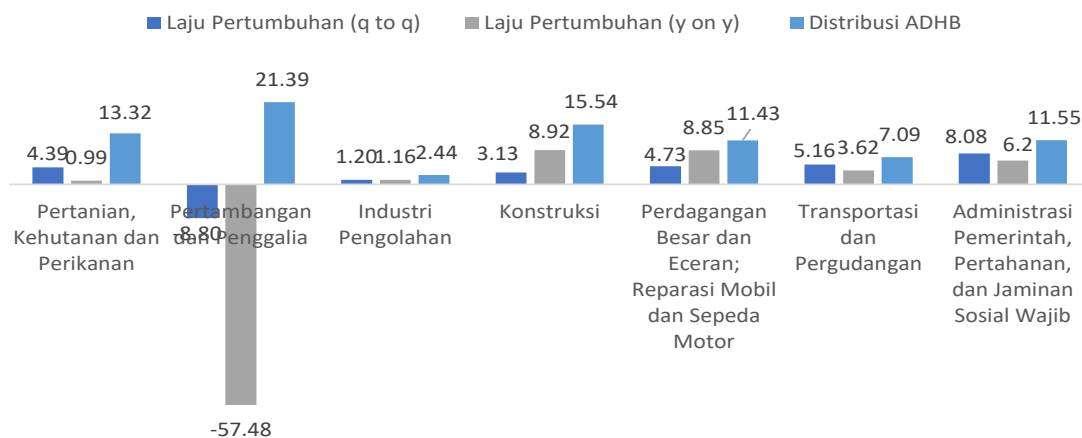
Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai Rp 45,29 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Papua triwulan II-2019 mengalami kontraksi -23,98 persen (y on y). Kontraksi pertumbuhan ini disebabkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai -57,48 persen akibat turunnya produksi tambang Freeport. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -0,93 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 (q to q) mengalami pertumbuhan positif tipis sebesar 0,57 persen. Adanya perayaan hari besar keagamaan dan libur panjang sekolah pada triwulan II ini menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 8,08 persen. Pertumbuhan positif juga dialami oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 7,31 persen; lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 5,77 persen; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,63 persen; dan lapangan usaha Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,13 persen.

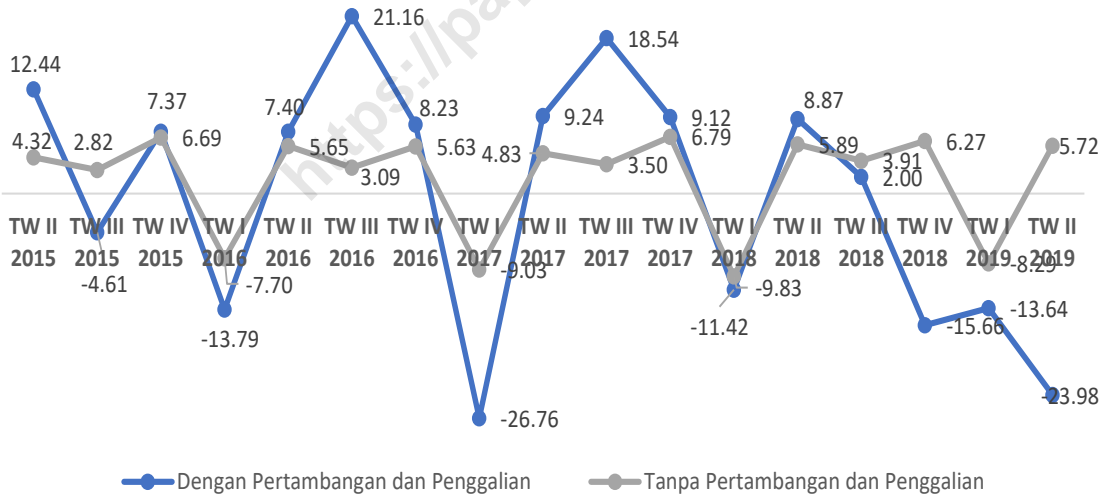
Gambar 15. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II-2019



Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan II-2019 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi jauh di atas lapangan usaha yang lain yaitu sebesar -27,03 persen, diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,84 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,65 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,49 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,31 persen.

Nilai PDRB per kapita Papua pada triwulan II-2019 sebesar Rp 13,40 juta, naik dibandingkan triwulan lalu yang sebesar Rp 13,12 juta atau naik sebesar 2,15 persen. Jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB perkapita triwulan II-2019 sebesar Rp 10,54 juta, juga menunjukkan peningkatan dari triwulan I-2019 yang senilai Rp 10,06 juta atau meningkat sebesar 4,78 persen.

Gambar 16. Pertumbuhan Ekonomi q-to-q Provinsi Papua, Triwulan II-2015 - Triwulan II-2019





Tahukah anda??

“Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi terdalam pada triwulan II-2019”

B. PDRB Menurut Pengeluaran

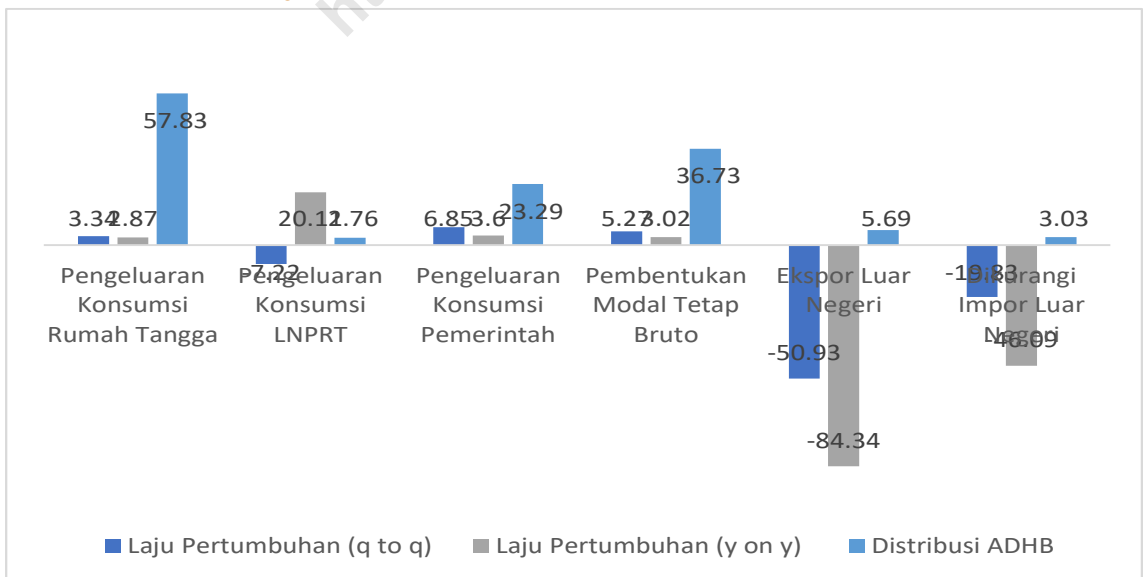
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 mengalami kontraksi sebesar 23,98 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar -84,34 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 (y-on-y), Komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,08 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,74 persen dan Komponen

PK-P sebesar 0,55 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya berada dibawah 0,50 persen.

Ekonomi Papua Triwulan II-2019 jika dibandingkan Triwulan I-2019 (q to q) tumbuh sebesar 0,57 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada komponen PK-RT sebesar 3,34 persen, PK-P sebesar 6,85 persen, dan komponen PMTB sebesar 5,27 persen.

Gambar 17. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan II-2019 Provinsi Papua



EKSPOR



Tahukah anda??

“Pada Juli 2019, total ekspor Papua mencapai US\$13,19 juta”

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Juli 2019 tercatat senilai US\$13,19 juta atau meningkat sebesar 36,26 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$9,68 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua terdiri dari barang migas sebesar US\$388 dan barang nonmigas sebesar US\$13,19 juta. Ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan Serui yaitu senilai US\$7,29 juta atau 55,35 persen dari total ekspor Papua.

Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Juli 2019 adalah senilai US\$562,17 juta atau menurun sebesar 78,47 persen dibandingkan total ekspor Januari-Juli 2018 yang senilai US\$2.610,54 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Ekspor Kayu & Barang dari Kayu (HS44) yang senilai US\$10,77 juta atau meningkat sebesar 69,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) m-to-m mengalami penurunan sebesar 85,69 persen dimana nilai ekspor golongan ini sebesar US\$0,01 juta pada Juli 2019. Sedangkan ekspor golongan Non Migas Lainnya yang senilai US\$2,41 juta mengalami penurunan 25,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, pada bulan ini tidak terdapat ekspor pada golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26).

Tabel 4. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua, Januari-Juli 2019

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Juli 2019* thdp Juni 2019	% Perubahan Jan-Juli'19 thd Jan-Jul 18	% Peran thd Total Ekspor Jan-Jul 19*
	Juni 2019	Juli 2019*	Jan-Jul 2018	Jan-Jul 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Total Ekspor	9,68	13,19	2.610,54	562,17	36,26	-78,47	100,00
Migas	0,01	0,00	0,06	0,02	-96,30	-58,75	0,00
Non Migas	9,67	13,19	2.610,48	562,15	36,40	-78,47	100,00

Ket:

Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

Nilai kumulatif ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) pada periode Januari-Juli 2019 sebesar US\$479,83 juta. Nilai ini menurun apabila dibandingkan dengan periode Januari-Juli 2018 yang sebesar US\$2.544,86 juta. Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) memiliki nilai kumulatif sebesar US\$60,37 juta. Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) memiliki nilai kumulatif sebesar US\$0,12 juta. Sementara nilai kumulatif ekspor golongan Non Migas Lainnya mengalami peningkatan menjadi US\$21,83 juta.

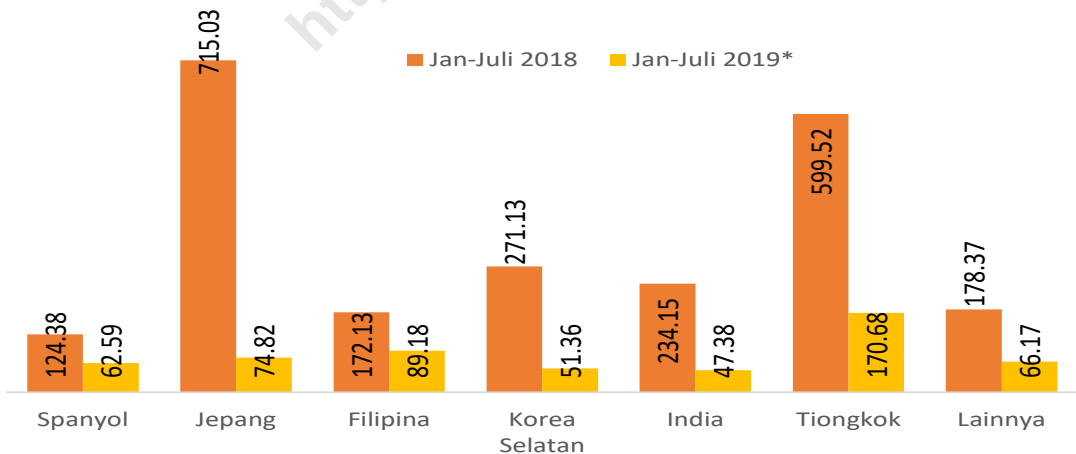
C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor ke enam negara utama pada Juli 2019 tercatat senilai US\$2,95 juta atau menurun 37,55 persen dibanding nilai pada Juni 2019 yang sebesar US\$4,72 juta.

Ekspor ke negara lainnya pada Juli 2019 yang senilai US\$10,24 juta mengalami peningkatan 106,44 persen dibanding Juni 2019 yang sebesar US\$4,96 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor terbesar adalah Saudi Arabia dengan nilai ekspor US\$3,47 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa industri kayu lapis..

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama dan negara lainnya pada periode Januari-Juli 2019 menurun masing-masing sebesar 76,56 persen dan 62,9 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 88,23 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Juli 2019.

Gambar 18. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari -Juli 2019 (Juta US\$)



IMPOR



Tahukah anda??

“Pada Juli 2019, total impor Papua mencapai US\$25,27 juta”

A. Impor Migas dan NonMigas

Impor Papua pada Juli 2019 tercatat senilai US\$25,27 juta yang terdiri dari impor migas senilai US\$9,75 juta dan impor nonmigas senilai US\$15,52 juta. Dibandingkan Juni 2019, nilai impor Papua mengalami peningkatan sebesar 63,91 persen yang dipengaruhi oleh adanya impor migas sebesar US\$9,75 juta dan kenaikan impor non migas sebesar 0,64 persen (naik US\$0,1 juta).

Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (HS84) yang memiliki nilai US\$3,11 juta atau sebesar 20,07 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas.

Total impor kumulatif Papua pada periode Januari-Juli 2019 senilai US\$197,57 juta atau menurun 32,58 persen bila dibandingkan total impor kumulatif pada periode Januari-Juli 2018 yang senilai US\$293,05 juta.

Tabel 5. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua, Januari -Juli 2019

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Juli'19* thd Jul18	% Perubahan Jan-Juli'19 thd Jan-Jul 18	% Peran thd Total Impor Jan-Juli 2019*
	Juni 2019	Juli 2019*	Jan-Jul 2018	Jan-Jul 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	15,42	25,27	293,05	197,57	63,91	-32,58	100,00
Migas	0,00	9,75	99,13	65,56	-	-33,87	33,18
Non Migas	15,42	15,52	193,91	132,01	0,64	-31,93	66,82

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Juli 2019 tercatat senilai US\$11,2 juta atau menurun 12,18 persen bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar US\$12,75 juta.

Golongan barang nonmigas utama yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah golongan Mesin/peralatan listrik (HS85) sebesar US\$1,89 juta, Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$0,81 juta, dan Karet dan barang dari karet (HS40) sebesar US\$0,64 juta. Nilai impor golongan nonmigas lainnya mengalami peningkatan sebesar 62,01 persen yaitu dari US\$2,67 juta menjadi US\$4,32 juta. Impor nonmigas lainnya yang terbesar berasal dari golongan Pesawat Terbang & bagiannya (HS88) senilai US\$2,79 juta.

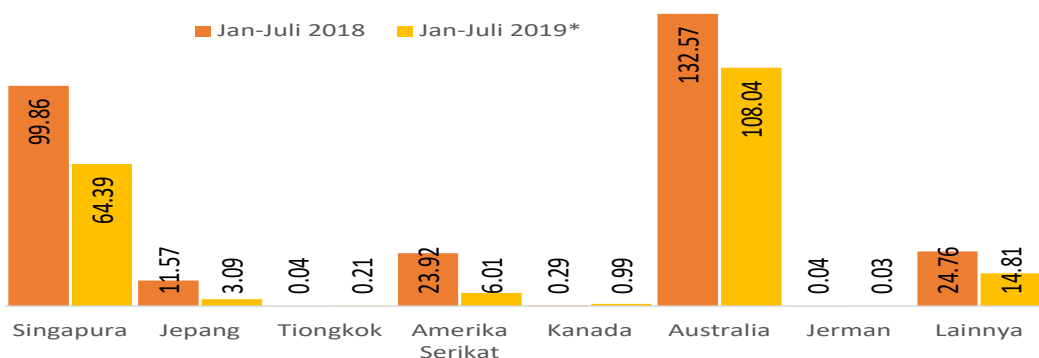
Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-Juli 2019 mengalami penurunan sebesar 35,03 persen, yaitu dari US\$168,25 juta menjadi US\$109,31 juta.

Penurunan tersebut didorong oleh turunnya nilai kumulatif impor golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$33,64 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya yang juga turun sebesar 11,57 persen atau lebih rendah US\$2,97 juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 55,33 persen terhadap total impor kumulatif Januari-Juli 2019.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada Juli 2019 sebesar US\$24,32 juta atau meningkat 71,53 persen dibandingkan nilai pada Juni 2019 yang sebesar US\$14,18 juta, sementara impor dari negara lainnya mengalami penurunan senilai US\$0,29 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada Juli 2019 adalah Australia senilai US\$11,65 juta (46,09 persen), Singapura dengan impor senilai US\$9,05 juta (35,83 persen), dan USA senilai US\$3,56 juta (14,1 persen).

Gambar 19. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari -Juli 2019



NILAI TUKAR PETANI (NTP)



Tahukah anda??

“Pada bulan Juli 2019, NTP Papua sebesar 93,14”

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap harga dibayar petani (Ib) dalam persentase merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

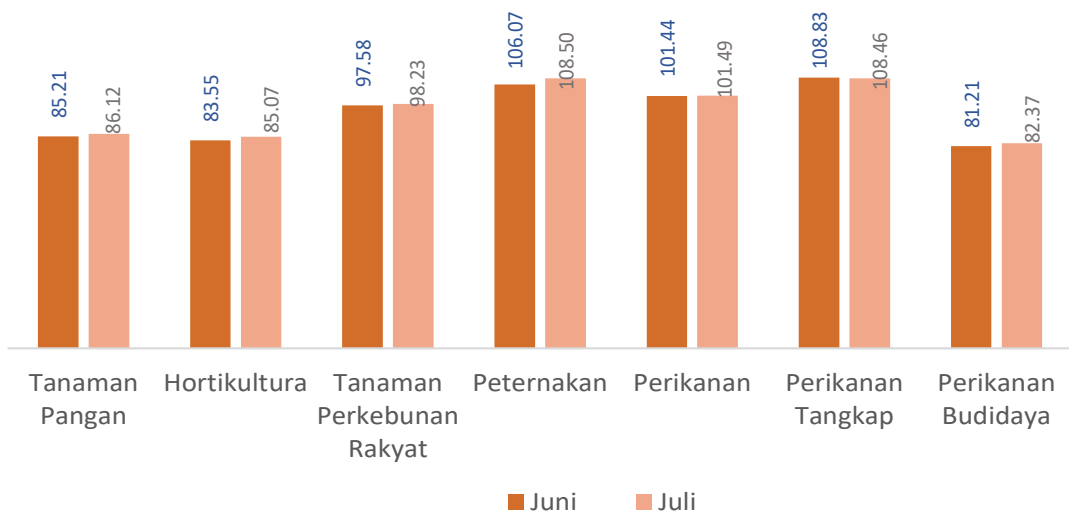
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Papua Juli 2019 tercatat naik 1,44 persen menjadi 93,14 dibandingkan NTP Juli 2019.

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, kenaikan indeks NTP disebabkan oleh perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar -0,22 persen, lebih kecil dari perubahan indeks harga diterima petani (It) yang mengalami kenaikan angka indeks sebesar 1,22 persen.

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan naik 1,07 persen, hortikultura naik 1,81 persen, tanaman perkebunan rakyat naik 0,66 persen, peternakan naik 2,29 persen, dan perikanan naik 0,05 persen.

Gambar 20. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Juni-Juli 2019 (2012=100)



Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani.

Pada Juli 2019, It Papua sebesar 124,85 atau naik 1,22 persen dibandingkan It Juli 2019. Kenaikan I_t terjadi karena It di subsektor Tanaman Pangan naik 0,82 persen, subsektor Hortikultura naik 1,55 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,42 persen, subsektor Peternakan naik 2,13 persen, dan subsektor Perikanan turun 0,04 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani.

Pada Juli 2019, Ib Papua sebesar 134,04 atau turun 0,22 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,33. Penurunan Ib gabungan tersebut didorong oleh turunnya Ib pada semua subsektor

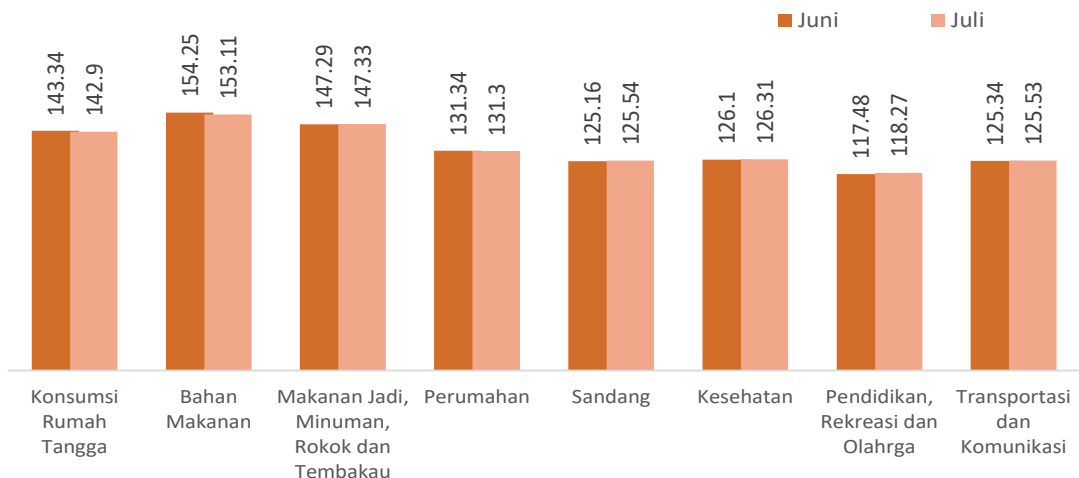
yaitu subsektor Tanaman Pangan turun 0,24 persen, subsektor Hortikultura turun 0,26 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,24 persen, subsektor Peternakan turun 0,15 persen, dan subsektor Perikanan turun 0,08 persen.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumsi Perdesaan

Pada Juli 2019, terjadi deflasi 0,3 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh turunnya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga. Penurunan indeks terbesar terjadi pada kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar -0,73 persen.

Dari 33 provinsi tercatat 18 provinsi mengalami inflasi perdesaan dan 15 provinsi mengalami deflasi perdesaan. Inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Bengkulu yaitu sebesar 1,38 persen dan inflasi terendah terjadi di Papua Barat sebesar 0,12 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Gorontalo yaitu turun sebesar -2,08 persen dan deflasi terkecil terjadi di Nusa Tenggara Timur yaitu turun sebesar -0,003 persen. .

Gambar 21. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Juni-Juli 2019 (2012=100)



ANGKUTAN LAUT



Tahukah anda??

“Jumlah penumpang berangkat dan datang dengan angkutan laut pada Juni 2019 masing-masing sebanyak 13.652 orang 20.057 orang.”

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Juni 2019 tercatat sebanyak 13.652 orang atau meningkat 7,1 persen dibanding Mei 2019 yang sebanyak 12.747 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang datang pada Juni 2019 tercatat sebanyak 20.057 orang atau meningkat 54,77 persen bila dibandingkan Mei 2019 yang sebanyak 12.959 orang.

Dilihat menurut pelabuhan, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing 10.972 orang dan 2.680 orang.

Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing sebesar 17.826 orang dan 2.231 orang.

Jumlah embarkasi penumpang angkutan laut pada Januari-Juni 2019 meningkat 12,76 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang sebanyak 60.001 orang. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penumpang di Pelabuhan Jayapura sebesar 13,11 persen dan Pelabuhan Merauke sebesar 10,98 persen.

Tabel 6. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2019

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Mei'19 (Orang)	Juni'19 (Orang)	% Perubahan Jun'19 *thd Mei'19	Mei'19 (Orang)	Juni'19 (Orang)	% Perubahan Jun'19 *thd Mei'19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	11.045	10.972	-0,66	10.095	17.826	76,58
Merauke	1.702	2.680	57,46	2.864	2.231	-22,10
Total	12.747	13.652	7,10	12.959	20.057	54,77

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Juni 2019 tercatat sebesar 7.404 ton atau menurun 28,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10.288 ton.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 5.178 ton atau menurun 38,48 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 2.226 ton atau naik 18,97 persen. Volume barang yang dimuat pada Januari-Juni 2019 menurun 68,26 persen bila dibandingkan dengan Januari-Juni 2018 sebesar 181.463 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura sebesar 71,55 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 38,72 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Juni 2019 sebesar 87.350 ton atau meningkat 3,29 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 84.568 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada Juni 2019 tercatat sebesar 59.440 ton atau turun 9,77 persen dibandingkan Mei 2019 yang sebesar 65.877 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 27.910 ton atau naik 49,32 persen. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke pada Januari-Juni 2019 meningkat 0,25 persen bila dibandingkan Januari-Juni 2018 yang sebesar 661.887 ton.

Tabel 7. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juni 2019

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Mei'19 (ton)	Juni'19 (ton)	% Perubahan Jun'19 *thd Mei'19	Mei'19 (ton)	Juni'19 (ton)	% Perubahan Jun'19 *thd Mei'19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	65.877	59.440	-9,77	8.417	5.178	-38,48
Merauke	18.691	27.910	49,32	1.871	2.226	18,97
Total	84.568	87.350	3,29	10.288	7.404	-28,03

INDUSTRI MANUFAKTUR



Tahukah anda??

“Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan II-2019 tumbuh negatif 1,74 persen”

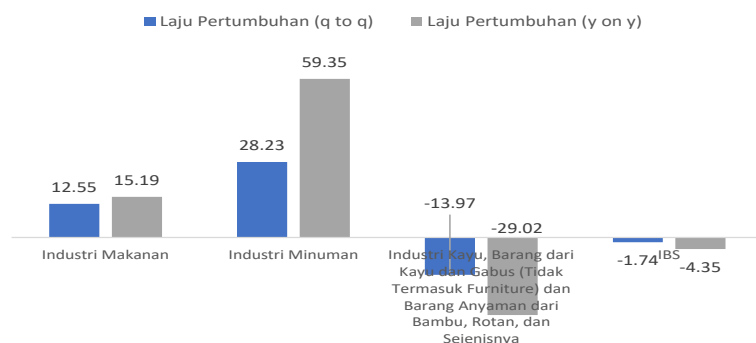
A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan II-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan II-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,74 persen dari Triwulan I-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh sebesar 1,91 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi dari Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Hal ini dikarenakan perusahaan masih kesulitan memperoleh ijin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusaha Hutan) sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi produksi. Kondisi berbeda terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11).

Komoditi ini selama Triwulan II-2019 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan Triwulan I-2019. Fenomena ini disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat saat bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan II-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan II-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,35 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan II-2019.

Gambar 22. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan II-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan II-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan II-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 8,40 persen dari Triwulan I-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beberapa komoditi yang memiliki share terbesar yaitu Industri Barang Galian Bukan Logam (KBLI 23). Adanya pembangunan pangkalan AURI di Biak mendorong banyaknya permintaan batu tela sehingga pertumbuhan Industri ini meningkat. Selain itu, meningkatnya permintaan makanan di Papua saat bulan Ramadhan dan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri

mendorong pertumbuhan Industri Makanan pada Triwulan II-2019 tumbuh positif. Fenomena lain yaitu mulai normalnya produksi alat angkutan kapal setelah mengalami kesulitan bahan baku pada Triwulan I-2019. Hal ini mendorong industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30) tumbuh tinggi yaitu 67,16 persen.

Secara y-o-y, Provinsi Papua Triwulan I-2019 tumbuh positif, sebesar 1,58 persen dibawah pertumbuhan produksi nasional yang tumbuh positif sebesar 5,52 persen. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi Industri Makanan (KBLI 10) yang memiliki share cukup besar yakni 9,78 persen dan Industri Minuman (KBLI 11) dengan share sebesar 8,76. Sehingga peningkatan pada keduanya cukup berpengaruh pada pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Papua.

Tabel 8. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan II-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan	
		q to q	y-on-y
10	Industri Makanan	4,23	3,45
11	Industri Minuman	6,15	8,34
13	Industri Tekstil	-10,84	10,69
14	Industri Pakaian Jadi	4,22	-13,57
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	24,02	-12,07
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-12,86	-9,99
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-48,17	-36,98
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	47,64	-15,63
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	3,81	-2,48
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	6,43	-14,28
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	13,85	14,67
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	67,16	-1,71
31	Industri Furnitur	-5,45	6,85
32	Industri Pengolahan Lainnya	33,23	-1,97
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	30,43	38,36

INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)



Tahukah anda??

“Kondisi ekonomi konsumen di Triwulan II-2019 sebesar 118,68”

A. Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II Tahun 2019

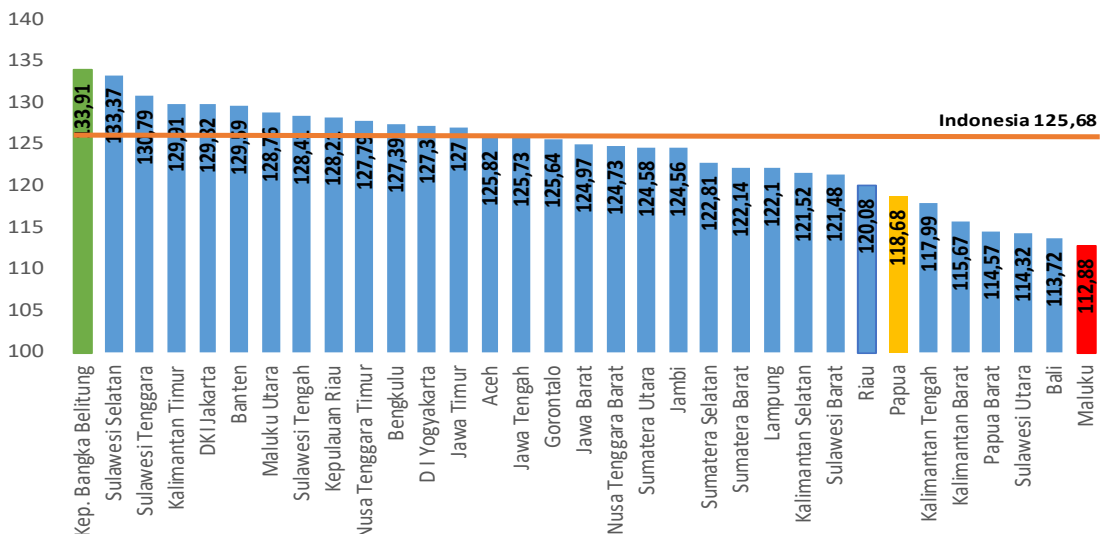
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Papua di triwulan II-2019 (April-Juni) sebesar 118,68. Angka ITK yang berada di atas 100 mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan kondisinya di triwulan I-2019 (Januari-Maret 2019) dengan nilai ITK Triwulan I-2019 sebesar 95,62.

Indikasi membaiknya kondisi ekonomi konsumen Papua di triwulan ini disebabkan oleh meningkatnya seluruh variabel pembentuk komponen ITK. Variabel tersebut adalah pendapatan rumah tangga sebesar

123,89, pengaruh inflasi terhadap total konsumsi rumah tangga sebesar 115,18 dan volume konsumsi barang/jasa sebesar 110,70. Peningkatan tersebut dipicu adanya pembayaran gaji, THR bagi PNS dan pensiunan.

Di tingkat nasional, kondisi ekonomi konsumen di triwulan II-2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya dengan indeks sebesar 125,68. Naiknya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional karena membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada seluruh besar provinsi di Indonesia. Provinsi Bangka Belitung tercatat memiliki ITK tertinggi yaitu sebesar 133,91. Sedangkan ITK terendah di Provinsi Maluku den-

Gambar 23. ITK Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



gan nilai indeks 112,88.

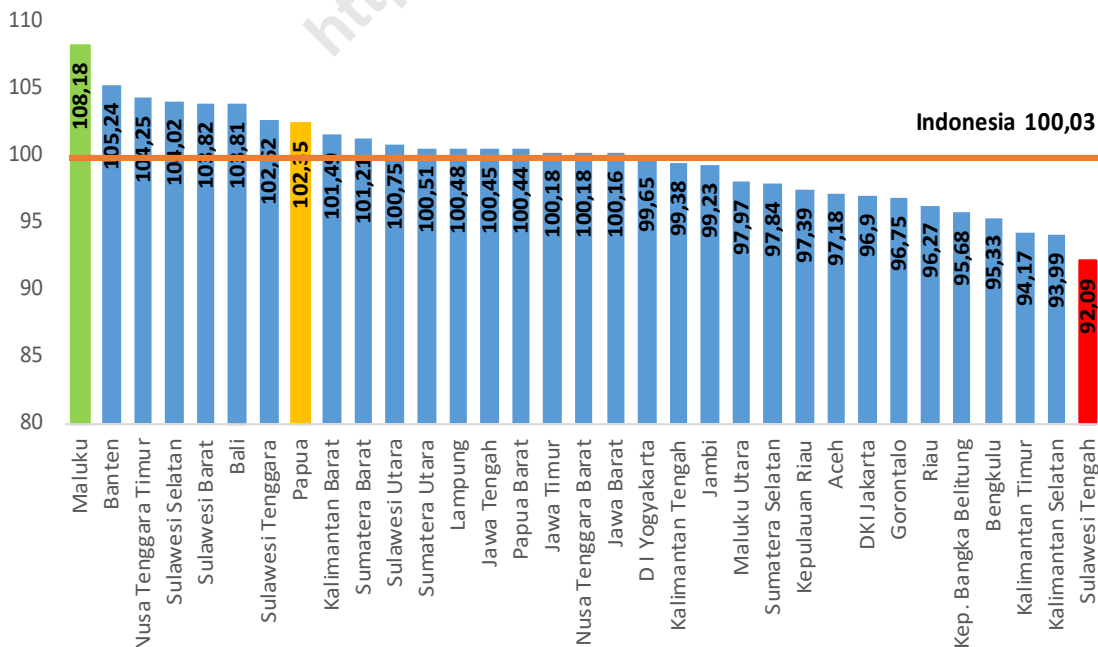
B. Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III Tahun 2019

Perkiraan ITK triwulan III-2019 Provinsi Papua diperkirakan sebesar 102,35 yang berarti kondisi ekonomi konsumen menurun dibandingkan kondisinya di triwulan II-2019. Untuk triwulan III-2019 (Juli-September 2019), angka ITK nasional diperkirakan sebesar 100,03 yang berarti kondisi ekonomi konsumen diperkirakan juga akan meningkat meskipun dengan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan kondisinya di triwulan II-2019.

Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan perkiraan Pendapatan Mendatang meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan pada triwulan III-2019 (nilai indeks 108,89), sedangkan rencana Pembelian Barang Tahun Lama, Rekreasi dan Pesta/Hajatan justru menurun dengan nilai indeks 90,89.

Selain itu, meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional disebabkan meningkatnya perkiraan kondisi ekonomi konsumen pada sebagian besar provinsi di Indonesia, meskipun ada beberapa provinsi yang perkiraan ITK triwulan II-2019 menurun. Perkiraan ITK tertinggi terjadi di Provinsi Maluku mencapai 108,18; sementara perkiraan ITK terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 92,09.

Gambar 24. Perkiraan ITK Triwulan III Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



<https://papua.bps.go.id>



PERTANIAN

TANAMAN PANGAN



Tahukah anda??

“Produksi Padi tahun 2018 Provinsi Papua mencapai 130,718 ton gabah kering giling”

Penghitungan angka produksi Padi tahun 2018 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area(KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

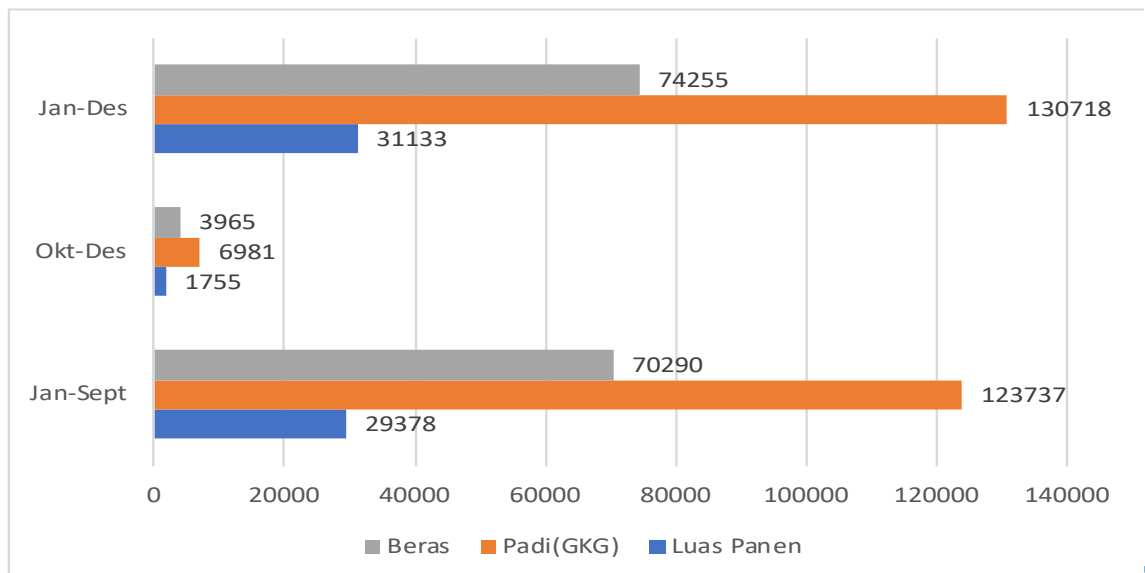
Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Provinsi Papua periode Januari-September 2018 sebesar 29.378 hektar. Sedangkan potensi luas panen bulan Oktober hingga Desember mencapai 1.755 hektar sehingga secara total luas panen di tahun 2018 mencapai 31.133 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua tahun 2018 mencapai 130.718 ton gabah kering giling (GKG), yang terdiri atas Produksi Padi sejak Januari hingga September 2018 sebesar 123.737 hektar.

Sementara potensi produksi padi 3 bulan terakhir (Oktober-Desember 2018) sebesar 6.981 ton.

Produksi Padi di Provinsi Papua dari Januari hingga September 2018 jika dikonversi menjadi beras dengan konversi GKG ke beras tahun 2018 setara 70.290 ton beras. Sementara itu, potensi produksi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 diperkirakan sebesar 3.965 ton. Sehingga secara total produksi beras tahun 2018 adalah sebesar 74.255 ton.

Gambar 25. Produksi Tanaman Pangan Provinsi Papua Tahun 2018





<https://panua.bps.go.id>

**INFORMASI
LAINNYA**

INFORMASI LAINNYA

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Surabaya sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2017 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 229,82. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 469,96. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan nilai IKK sebesar 137,54.

B. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI Provinsi Papua tahun 2018 adalah 62,20 naik 0,86 poin dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua pada level 'sedang'.

IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 4,73 poin (dari 89,09 menjadi 84,36), peningkatan aspek Hak-hak Politik sebesar 5,74 poin (dari 42,16 menjadi 47,90) dan sedikit kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,14 poin (dari 56,91 menjadi 57,05).

C. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Secara umum, gini ratio di Papua selama kurun waktu 2010-2018 berfluktuasi. Tahun 2010, gini ratio Papua tercatat sebesar 0,414 dan meningkat menjadi 0,419 pada Maret 2011. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014, nilai Gini Ratio berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu sebesar 0,459.

Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,421 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,394 pada Maret 2019.



LAMPIRAN

PENJELASAN TEKNIS

- ❖ Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA. Penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
- ❖ PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran ekonomi.
- ❖ Penghitungan Indeks Harga Konsumen saat ini menggunakan tahun dasar 2012=100 sehingga sejak tahun 2014, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia. Di Papua kota IHK diwakili oleh Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.
- ❖ Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
- ❖ Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan paling sedikit satu jam tidak terputus dalam seminggu lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif terlibat secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2014 - 2018

Jenis Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial						
Kependudukan dan Kemiskinan	Jumlah penduduk (jiwa)	3.149.375	3.207.444	3.265.444	3.322.526	3.379.302
	IPM	57,25	58,05	59,09	60,06	N/A
	1. AHH saat lahir (tahun)	65,09	65,12	65,14	65,36	N/A
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	9,95	10,23	10,54	10,83	N/A
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,99	6,15	6,27	6,52	N/A
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.469	6.637	6.996	7.159	N/A
	Angkatan kerja (jiwa)	1.709.668	1.743.160	1.753.858	1.851.486	1.808.848 ¹⁾
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,26	78,77	77,3	79,38	76,04 ¹⁾
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,72	2,97	3,96	3,20	3,42 ¹⁾
	Persentase penduduk miskin (persen)	28,17	28,54	27,62	27,43	27,53 ¹⁾
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	402.031	427.176	457.541	499.643	540.099 ²⁾
	Distribusi pendapatan					
	40 % berpendapatan rendah	15,41	14,36	14,71	15,55	15,35 ²⁾
	40 % berpendapatan sedang	36,36	42,38	41,13	41,03	40,10 ²⁾
	20 % berpendapatan tinggi	48,24	43,26	44,16	43,42	44,55 ²⁾
Gini Ratio	0,39	0,397	0,398	0,398	0,394	
Indikator Ekonomi						
Perkembangan Ekonomi	Ekspor-Impor					
	Ekspor (Juta US\$)	2.007,34	2.004,04	2.454,59	3.856,46	-
	<i>Januari-Juli 2019</i>					562,17
	Impor (Juta US\$)	1.831,81	1.907,96	446,51	521,87	-
	<i>Januari-Juli 2019</i>					197,57
	Neraca Perdagangan (Juta US\$)	175,53	96,08	2.008,08	3.334,5	-
	<i>Januari-Juli 2019</i>					364,6
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	2,79	4,13	2,41	6,70	-0,41 ³⁾
	Inflasi Kabupaten Merauke	5,76	0,82	1,25	5,42	-0,49 ³⁾
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	7,97	9,21	4,64	7,33	-23,98 ⁴⁾
	Tanpa Tambang (Persen)	8,11	6,52	5,18	5,04	5,72 ⁴⁾
	PDRB Berlaku					
	Dengan Tambang (miliar Rp)	150.307,28	173.208,86	188.945,17	210.659,81	45.290,07 ⁴⁾
Tanpa Tambang (juta Rp)	101.880,49	114.183,51	122.464,78	133.313,76	35.603,24 ⁴⁾	
PDRB Harga Konstan						
Dengan Tambang (juta Rp)	130.311,60	142.224,93	148.822,52	159.728,93	31.867,39 ⁴⁾	
Tanpa Tambang (juta Rp)	77.400,24	82.384,56	86.648,46	91.016,63	23.492,40 ⁴⁾	

¹⁾ Keadaan Februari 2019

²⁾ Keadaan Maret 2019

³⁾ Keadaan Juli 2019

⁴⁾ Keadaan Agustus 2019 (Triwulan II-2019)

N/A : Not Available (data belum tersedia)

**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	247,59	195,66	179,69	168,31	156,56
2	Jayawijaya	254,25	269,20	282,04	290,37	311,96
3	Jayapura	144,52	131,25	128,93	137,54	125,98
4	Nabire	164,59	148,86	152,00	147,53	150,45
5	KepulauanYapen	158,31	145,03	144,48	144,96	142,25
6	Biak Numfor	153,17	167,96	153,00	142,21	134,88
7	Paniai	214,95	227,34	215,29	225,31	250,29
8	Puncak Jaya	413,38	409,55	423,41	436,94	464,12
9	Mimika	193,34	173,41	156,16	148,00	150,54
10	Boven Digoel	180,93	196,67	181,24	171,29	161,96
11	Mappi	219,06	204,81	190,36	180,53	167,70
12	Asmat	226,59	207,30	220,75	231,32	213,94
13	Yahukimo	197,53	216,76	229,55	242,78	220,02
14	Pegunungan Bintang	386,29	367,19	379,97	391,44	368,02
15	Tolikara	385,95	366,04	351,04	351,23	377,27
16	Sarmi	242,60	219,74	200,31	188,91	163,77
17	Keerom	176,76	170,34	157,21	160,94	147,62
18	Waropen	152,10	166,40	154,47	163,01	186,5
19	Supiori	185,87	176,18	160,77	150,79	149,02
20	Mamberamo Raya	187,03	194,18	182,07	192,76	208,29
21	Nduga	321,30	342,18	326,15	318,34	325,36
22	Lanny Jaya	357,07	337,46	325,43	332,92	337,65
23	Mamberamo Tengah	399,62	379,92	392,84	403,74	429,33
24	Yalimo	388,65	369,21	352,28	343,90	370,50
25	Puncak	462,84	449,72	454,67	469,96	498,98
26	Dogiyai	235,19	220,72	204,28	209,49	236,53
27	Intan Jaya	431,26	424,02	397,57	412,52	441,38
28	Deiyai	222,61	221,29	218,81	229,29	253,83
29	Kota Jayapura	172,80	158,69	150,07	147,06	132,86

**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	247,59	195,66	179,69	168,31	156,56
2	Jayawijaya	254,25	269,20	282,04	290,37	311,96
3	Jayapura	144,52	131,25	128,93	137,54	125,98
4	Nabire	164,59	148,86	152,00	147,53	150,45
5	KepulauanYapen	158,31	145,03	144,48	144,96	142,25
6	Biak Numfor	153,17	167,96	153,00	142,21	134,88
7	Paniai	214,95	227,34	215,29	225,31	250,29
8	Puncak Jaya	413,38	409,55	423,41	436,94	464,12
9	Mimika	193,34	173,41	156,16	148,00	150,54
10	Boven Digoel	180,93	196,67	181,24	171,29	161,96
11	Mappi	219,06	204,81	190,36	180,53	167,70
12	Asmat	226,59	207,30	220,75	231,32	213,94
13	Yahukimo	197,53	216,76	229,55	242,78	220,02
14	Pegunungan Bintang	386,29	367,19	379,97	391,44	368,02
15	Tolikara	385,95	366,04	351,04	351,23	377,27
16	Sarmi	242,60	219,74	200,31	188,91	163,77
17	Keerom	176,76	170,34	157,21	160,94	147,62
18	Waropen	152,10	166,40	154,47	163,01	186,5
19	Supiori	185,87	176,18	160,77	150,79	149,02
20	Mamberamo Raya	187,03	194,18	182,07	192,76	208,29
21	Nduga	321,30	342,18	326,15	318,34	325,36
22	Lanny Jaya	357,07	337,46	325,43	332,92	337,65
23	Mamberamo Tengah	399,62	379,92	392,84	403,74	429,33
24	Yalimo	388,65	369,21	352,28	343,90	370,50
25	Puncak	462,84	449,72	454,67	469,96	498,98
26	Dogiyai	235,19	220,72	204,28	209,49	236,53
27	Intan Jaya	431,26	424,02	397,57	412,52	441,38
28	Deiyai	222,61	221,29	218,81	229,29	253,83
29	Kota Jayapura	172,80	158,69	150,07	147,06	132,86
	Provinsi Papua	188,70	191,86	247,91	239,98	227,90

**Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Papua
Tahun 2013-2018**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	66,88	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38
2	Jayawijaya	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82
3	Jayapura	69,21	69,55	70,04	70,50	70,97	71,25
4	Nabire	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11	67,70
5	KepulauanYapen	64,34	64,89	65,28	65,55	66,07	67,00
6	Biak Numfor	69,35	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96
7	Paniai	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91	55,83
8	Puncak Jaya	43,36	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39
9	Mimika	69,50	70,40	70,89	71,64	72,42	73,15
10	Boven Digoel	57,96	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83
11	Mappi	55,51	55,74	56,11	56,54	57,10	57,72
12	Asmat	45,54	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37
13	Yahukimo	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51
14	Pegunungan Bintang	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24	44,19
15	Tolikara	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85
16	Sarmi	59,51	60,48	60,99	61,27	62,31	63,00
17	Keerom	62,49	62,73	63,43	64,10	64,99	65,75
18	Waropen	61,68	61,97	62,35	63,10	64,08	64,80
19	Supiori	59,40	59,70	60,09	60,59	61,23	61,84
20	Mamberamo Raya	47,28	47,88	48,29	49,00	50,25	51,22
21	Nduga	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42
22	Lanny Jaya	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34
23	Mamberamo Tengah	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41
24	Yalimo	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13
25	Puncak	37,73	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81
26	Dogiyai	51,46	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44
27	Intan Jaya	42,69	43,51	44,35	44,82	45,68	46,55
28	Deiyai	47,74	48,12	48,28	48,50	49,07	49,55
29	Kota Jayapura	77,46	77,86	78,05	78,56	79,23	79,61
	Provinsi Papua	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06

**PDRB Perkapita (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2015-2018 (Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	47.811.023,59	53.078.198,97	57.659.946,17	64.366.933,04
2	Jayawijaya	26.251.551,45	29.161.656,98	31.966.401,39	35.368.758,14
3	Jayapura	82.174.652,54	92.994.178,45	102.332.593,12	112.937.553,90
4	Nabire	54.980.416,67	60.346.153,97	65.521.130,70	70.179.656,67
5	KepulauanYapen	32.962.336,88	35.946.153,97	38.006.774,65	40.117.817,32
6	Biak Numfor	32.522.006,57	35.627.422,40	34.498.868,06	34.930.879,39
7	Paniai	17.759.824,71	19.599.038,08	20.705.782,81	22.532.059,76
8	Puncak Jaya	8.908.036,01	9.384.126,04	9.7655.576,66	10.316.039,35
9	Mimika	268.986.190,59	315.981.759,90	353.805.463,82	396.040.126,62
10	Boven Digoel	56.274.175,87	60.582.064,59	64.411.696,37	67.525.651,17
11	Mappi	21.076.162,88	23.205.239,84	25.654.125,49	26.872.878,93
12	Asmat	18.500.627,90	20.286.651,41	21.889.372,44	23.626.517,20
13	Yahukimo	9.373.344,49	10.015.819,06	10.892.973,93	11.808.450,71
14	Pegunungan Bintang	18.274.902,13	20.274.951,77	22.051.088,02	23.721.693,65
15	Tolikara	8.593.098,44	9.223.135,51	9.861.303,81	10.634.936,38
16	Sarmi	50.008.966,04	54.872.042,05	59.990.021,67	64.315.850,93
17	Keerom	39.483.966,54	43.158.726,32	46.182.136,00	48.422.111,60
18	Waropen	49.936.092,92	55.600.644,53	59.792.941,40	62.601.875,94
19	Supiori	42.162.729,85	44.922.394,76	46.754.638,83	47.298.604,45
20	Mamberamo Raya	48.078.905,95	54.489.881,63	59.778.066,95	63.708.877,65
21	Nduga	8.580.085,51	9.474.740,84	10.504.868,68	11.469.337,55
22	Lanny Jaya	7.154.441,68	7.912.642,87	8.661.891,10	9.453.175,66
23	Mamberamo Tengah	17.391.828,66	19.265.806,98	20.823.205,72	22.468.981,84
24	Yalimo	13.710.592,18	15.317.323,67	16.559.570,23	18.254.273,14
25	Puncak	8.704.367,30	9.756.558,61	10.667.499,68	11.569.147,43
26	Dogiyai	9.710.998,26	10.680.684,94	11.566.519,52	12.501.427,55
27	Intan Jaya	19.428.069,39	21.579.591,89	22.489.277,23	24.251.939,80
28	Deiyai	13.274.000,97	15.053.256,09	16.000.875,54	17.484.748,86
29	Kota Jayapura	81.574.706,76	90.135.176,33	95.739.151,131	102.139.373,87
	Provinsi Papua	47.726.067,65	54.002.146,16	57.866.303,29	63.403.511,08

*angka sementara

**angka sangat sementara

<https://papua.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp: (Telp. (0967) 5165 999, 5165 107
Homepage: <http://papua.bps.go.id>
E-mail: bps9400@bps.go.id



9 772477 447008